

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dinamika perkembangan masyarakat yang majemuk memang telah menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab Partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia dalam menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, partai sebagai bagian dari pergerakan demokrasi seharusnya dapat memberikan andil yang sangat besar bagi kemajuan bangsa. Dan, diperlukan kesadaran dari partai untuk membangun kesadaran politik yang kolektif di masyarakat. Terutama hal yang perlu mendapat perhatian partai politik dalam menghadapi pemilu seperti bagaimana agar partai-partai memiliki mekanisme demokratis secara internal yang memungkinkan kader terbaik yang jadi capres.

Partai politik dibentuk karena ada visi misi, orientasi, nilai-nilai, tujuan, cita-cita, dan keinginan untuk mewujudkan cita-cita tersebut melalui sebuah program yang dilaksanakan dengan cara konstitusional untuk dapat memperoleh kekuasaan politik dan merebut kursi. Terdapat struktur peluang politik melalui aspek institusional dan politik terhadap kemunculan partai baru. Kemudian, partai tersebut akan berhadapan dengan partai lama yang cenderung sudah biasa mempertahankan eksistensinya pada pemilu dibuktikan dengan keberhasilan mereka dalam meraih kursi di parlemen. Dalam hal ini, berbagai kelompok dalam

masyarakat memilih untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingannya melalui partai politik atau dikatakan sebagai penyaluran kepentingan kolektif (*collective will*) yang mana merepresentasikan kepentingan dari berbagai kelompok dalam masyarakat.

Partai juga seharusnya dapat terus menciptakan basis massa yang terorganisir kebawah sebagai pendukung program-program partai sebagai implementasi ideologinya. Ideologi partai seharusnya dapat menjadi daya tarik masyarakat dalam memberikan suara di pemilihan umum bila ideologi partai tersebut berhasil dinilai sebagai sarana untuk mengagregasi kepentingan umum. Melalui pemilu, partai politik seharusnya memang dapat menawarkan alternatif kebijakan dan calon pemimpin yang tepat guna mengelola potensi konflik, serta untuk menjaga agar saluran komunikasi tetap terbuka sehingga masyarakat senantiasa dapat terhubung dengan proses politik secara sehat. Dalam hal ini partai sebagai bagian dari pergerakan demokrasi harus dapat memberikan andil yang sangat besar bagi kemajuan bangsa dan kepentingan rakyat .

Pada mulanya partai politik lahir sebagai manivestasi bangkitnya kesadaran nasional, kesadaran akan satu bangsa. Kesadaran bahwa manusia hidup secara berkelompok dan tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kemunculan partai politik salah satunya merupakan alat pemersatu bangsa karena mengingat banyaknya suku dan budaya di Indonesia, sehingga dengan adanya partai politik tidak ada lagi diskriminasi antar suku dan saling ego dengan menganggap sukunya yang lebih baik lalu berjuang dengan memilih jalan dengan sendirinya. Kesadaran bersatunya bermacam-macam aneka ragam kebudayaan menjadi satu yang utuh dan serasi.

Kesadaran akan adanya kesamaan hak bagi seluruh lapisan masyarakat dalam bidang politik juga menunjang lahirnya sebuah partai politik .

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar“. Makna dari kedaulatan ditangan Rakyat ini ialah rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan, guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang majemuk dan berwawasan kebangsaan, partai politik merupakan saluran untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen pemimpin, baik untuk tingkat nasional maupun daerah dan rekrutmen pimpinan berbagai komponen penyelenggara negara, oleh karena itu peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, dan selain itu untuk mengakomodasi aspirasi ke-anekaragaman daerah maka dibentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang anggota- anggotanya dipilih dari perseorangan bersamaan dengan Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD.

Meski Pemilu 2024 masih setahun lagi, sejumlah partai politik (parpol) baru mulai bermunculan ke publik. Di antaranya, ada Partai Solidariats Indonesia (PSI), Partai Ummat, Partai Masyumi, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas), Partai Indonesia Terang (PIT), Partai Negeri Daulat

Indonesia (Pandai), Partai Nusantara, dan Partai Indonesia Damai (PID), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dan Partai Gelora. Tentu partai-partai baru tersebut harus melewati sejumlah tahapan untuk dapat menjadi peserta pemilu.

Tahapan itu seperti pendaftaran diri ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum dan HAM) untuk memperoleh legalitas kelembagaan dan pendaftaran ke KPU, kemudian dilakukan verifikasi faktual sehingga layak menjadi peserta pemilu. Tentu syarat-syarat ini bukanlah hal mudah. Kalaupun mereka lolos verifikasi faktual KPU, partai-partai baru tersebut harus bekerja keras dan cerdas agar lolos ambang batas parlemen (*Parliamentary threshold*) sebesar 4%. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) disebutkan bahwa ambang batas parlemen adalah sebesar 4% atau dengan kata lain partai politik yang memiliki suara 4% berhak untuk memperoleh kursi di parlemen.

Kehebatan partai ditentukan pada pesona kharisma tokoh tertentu, bukan lagi mekanisme organisasi kepartaian yang berlaku. Kemenangan caleg pun lebih disebabkan kekuatan bukan kualitas. Berdasarkan keputusan KPU menetapkan hasil verifikasi faktual terhadap partai politik yang akan berlaga di Pemilu Serentak 2019. agar lolos verifikasi badan hukum maka partai politik harus memiliki kepengurusan pada setiap provinsi, dan paling sedikit 75 persen dari jumlah kabupaten/kota yang bersangkutan. Selain itu, paling sedikit 50 persen dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan. Inilah era pemilu liberal yang mana pertarungan politik ditentukan kuantitas, bukan kualitas. Kekuatan partai dikendalikan pasar bebas, bukan lagi ideologi dan jati diri.

Pada pemilihan anggota legislatif tahun 2014 dan 2019 partai kebangkitan bangsa di Kabupaten Batubara tidak mendapatkan satu kursi pun di parlemen. Tetapi pada 17 april 2024 negara Indonesia kembali melaksanakan pemilu serentak pemilihan presiden dan pemilihan legislatif di selenggarakan secara bersamaan di seluruh wilayah negara Indonesia. Di Kabupaten Batubara sendiri pemilihan legislatif dilaksanakan di 5 dapil. Dapil 1 diikuti oleh kecamatan Lima Puluh, untuk dapil 2 diikuti oleh kecamatan Talawi dan Kecamatan Tanjung Tiram. Dapil 3 diikuti oleh kecamatan Sei Balai, dapi 4 diikuti oleh kecamatan Sei Suka dan Kecamatan Medang Deras. Yang terakhir dapil 5 diikuti oleh kecamatan Air Putih. Pada pemilihan anggota DPRD 2014-2019 Partai Kebangkitan Bangsa tidak mendapat satu kursi pun di kabupaten Batubara. Namun, pada saat pemilihan anggota DPRD Kabupaten tahun 2024 di Kabupaten Batubara Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 3 kursi DPRD di dapil Batubara 2 yang terpilih adalah Mukhlis B.N,di dapil 3 yang terpilih adalah Khairul Aswad,dan di dapil 5 yang terpilih Sarianto Damanik.

Tabel 1.1

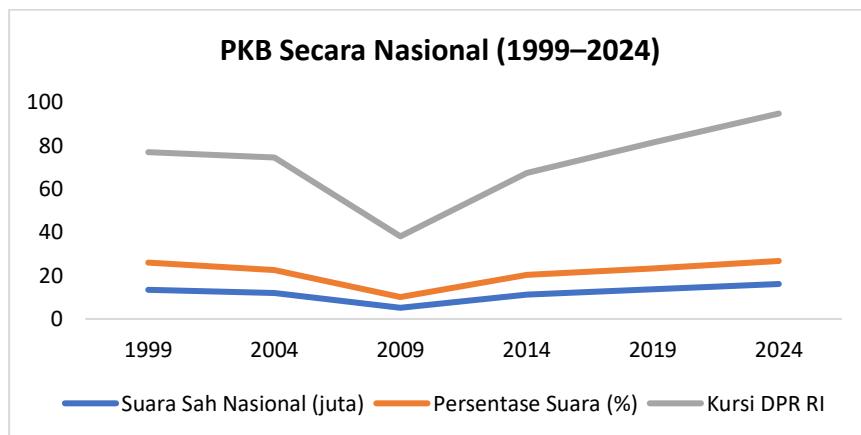
Perolehan Suara dan Kursi PKB Secara Nasional (1999–2024)

Tahun	Suara Sah Nasional (juta)	Persentase Suara (%)	Kursi DPR RI
1999	13,34	12,62%	51
2004	11,99	10,56%	52
2009	5,15	4,95%	28
2014	11,29	9,04%	47
2019	13,57	9,69%	58
2024	16,12	10,62%	68

Sumber: Keputusan KPU (2024). *Hasil Penghitungan Suara Sah Pemilu 1999–2024.*

Pada Tabel 1.1 Perolehan Suara dan Kursi PKB Secara Nasional (1999–2024), tabel ini menunjukkan fluktuasi suara dan kursi PKB secara nasional selama enam pemilu. PKB mengalami puncak elektoral pertama pada tahun 1999 dengan 12,62% suara dan 51 kursi, kemudian mengalami penurunan tajam pada 2009 dengan hanya 4,95% suara dan 28 kursi. Namun, tren positif kembali terlihat sejak 2014 hingga mencapai capaian tertinggi pada 2024, yakni 10,62% suara sah nasional dan 68 kursi DPR RI. Relevansi dari data ini menunjukkan keberhasilan PKB dalam membangun kembali kekuatan elektoralnya melalui strategikomunikasi politik yang efektif di tingkat nasional. Strategi ini berdampak hingga ke daerah, termasuk Kabupaten Batu Bara, melalui efek ekor jas (effect coattail).

Gambar 1.1
Grafik PKB Secara Nasional (1999–2024)



Sumber : Diolah dari Tabel 1.1, Keputusan KPU (2024). *Hasil Penghitungan Suara Sah Pemilu 1999–2024.*

Dilihat pada grafik diatas menunjukkan perjalanan naik-turun perolehan suara dan kursi PKB di DPR RI. Setelah meraih suara tinggi di tahun 1999, PKB mengalami penurunan tajam hingga titik terendah pada 2009. Namun, sejak 2014, tren mulai membaik dan terus meningkat. Pada 2024, PKB mencatat hasil terbaiknya dengan suara dan kursi terbanyak sepanjang sejarah partai, menandakan pemulihan dan penguatan posisi politik secara nasional.

Tabel 1.2

Perolehan Suara dan Kursi PKB di DPRD Provinsi Sumatera Utara (1999–2024)

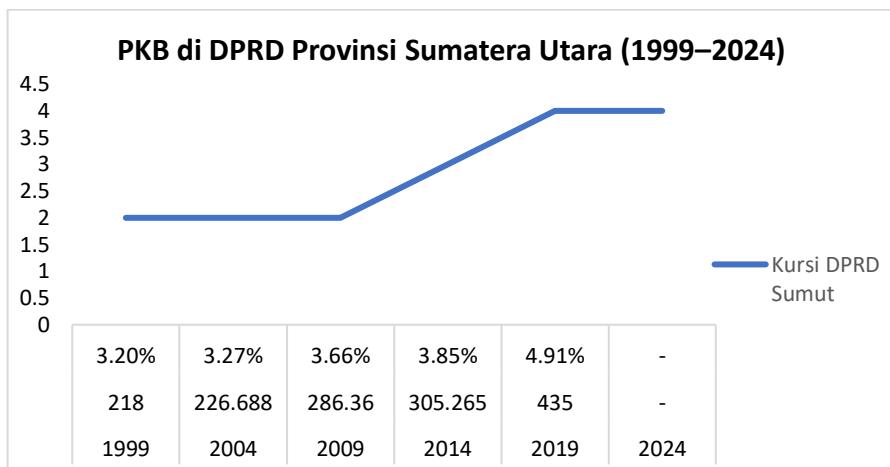
Tahun	Suara Sah PKB	Persentase Suara (%)	Kursi DPRD Sumut
1999	218.000	3,2%	2
2004	226.688	3,27%	2
2009	286.360	3,66%	2
2014	305.265	3,85%	3
2019	435.000	4,91%	4
2024	-	-	4

Sumber : KPU Provinsi Sumatera Utara No. 24/PR.01.3-Kpt/12/Prov/V/2024

Berdasarkan tabel diatas perolehan Suara dan Kursi PKB di DPRD Provinsi Sumatera Utara (1999–2024). Dalam kurun waktu 25 tahun, PKB mampu mempertahankan eksistensinya di DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan tren yang cenderung meningkat. Suara sah PKB naik dari 218.000 (1999) menjadi 435.000 (2019), dengan perolehan kursi meningkat dari 2 menjadi 4 pada 2024. Relevansi data ini mengindikasikan penguatan struktur dan jaringan komunikasi politik PKB di tingkat regional, yang secara langsung memperkuat basis pergerakan politik di tingkat kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi partai tidak hanya berjalan secara vertikal dari pusat ke daerah, tetapi juga secara horizontal di level provinsi, menciptakan sinergi yang mendukung keberhasilan di Kabupaten Batu Bara.

Gambar 1.2

Grafik PKB di DPRD Provinsi Sumatera Utara (1999–2024)



Sumber : Diolah dari Tabel 1.2, KPU Provinsi Sumatera Utara No. 24/PR.01.3-

Kpt/12/Prov/V/2024

Berdasarkan grafik “PKB di DPRD Provinsi Sumatera Utara (1999–2024)”, terlihat bahwa perolehan kursi PKB di tingkat provinsi cenderung stabil pada angka 2 kursi sejak 1999 hingga 2009, meskipun terjadi peningkatan suara dari 218 ribu menjadi 286 ribu. Kenaikan signifikan mulai terlihat pada Pemilu 2014 dan 2019, di mana PKB berhasil meraih 4 kursi dengan jumlah suara mencapai 435 ribu atau 4,91%. Dilihat dari tren tersebut, PKB menunjukkan penguatan elektoral di Sumatera Utara secara bertahap, yang mencerminkan konsistensi dukungan di tingkat lokal serta kemungkinan pengaruh dari strategi politik nasional yang lebih efektif dan berdampak ke daerah melalui efek ekor jas.

Tabel 1.3

Perolehan Kursi PKB di DPRD Kabupaten Batu Bara (2014–2029)

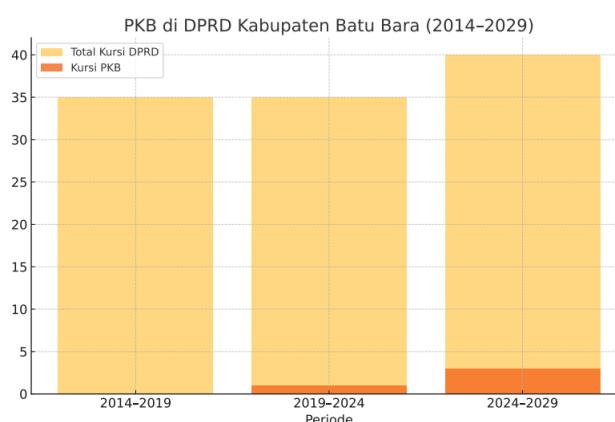
Periode	Jumlah Kursi DPRD	Jumlah Kursi PKB
2014–2019	35 kursi	0 kursi
2019–2024	35 kursi	1 kursi
2024–2029	40 kursi	3 kursi

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batu Bara.

Berdasarkan tabel diatas, terlihat lonjakan signifikan perolehan kursi PKB di DPRD Batu Bara: dari 0 kursi (2014–2019), menjadi 1 kursi (2019–2024), lalu 3 kursi (2024–2029). Kenaikan ini menunjukkan efektivitas strategi komunikasi politik PKB, seperti pendekatan keagamaan dan kultural, pemanfaatan tokoh lokal, komunikasi digital terstruktur, serta penguatan basis NU dan pesantren. Ini membuktikan bahwa strategi yang tepat dapat mengubah peta elektoral di daerah.

Gambar 1.3

Grafik PKB di DPRD Kabupaten Batu Bara (2014–2029)



Sumber : Diolah dari Tabel 1.3, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batu Bara., 27 Mei 2025.

Berdasarkan grafik, perolehan kursi PKB di DPRD Kabupaten Batu Bara mengalami peningkatan signifikan dari 0 kursi pada periode 2014–2019, menjadi 1

kursi pada 2019–2024, dan melonjak menjadi 3 kursi pada 2024–2029. Lonjakan ini mencerminkan keberhasilan PKB dalam menerapkan strategi komunikasi politik yang efektif, seperti pendekatan kultural berbasis NU, pemanfaatan tokoh lokal, serta komunikasi digital yang lebih terarah. Strategi ini berperan penting dalam memperluas dukungan elektoral di tingkat daerah.

Di tingkat lokal, khususnya Kabupaten Batu Bara, kinerja elektoral PKB juga mengalami perubahan signifikan. Pada periode 2014–2019, PKB tidak mendapatkan satu pun kursi di DPRD Kabupaten Batu Bara. Hal ini mengindikasikan lemahnya struktur partai serta tidak efektifnya pendekatan komunikasi politik pada masa itu. Namun, pada periode 2019–2024, PKB mulai menunjukkan perbaikan dengan meraih satu kursi, yang menjadi titik awal pemulihian elektoral partai di tingkat lokal. Perubahan terbesar terjadi pada periode 2024–2029, di mana PKB berhasil meraih tiga kursi di DPRD Kabupaten Batu Bara, yang menunjukkan peningkatan kepercayaan publik terhadap partai tersebut. Strategi komunikasi politik yang berbasis pada pendekatan kultural, personal, dan pemanfaatan media sosial diduga menjadi faktor kunci keberhasilan ini. Data ini penting untuk dianalisis lebih lanjut guna memahami bagaimana komunikasi politik berperan sebagai strategi utama PKB dalam mendekatkan diri kepada masyarakat Batu Bara.

Dalam sistem demokrasi, partai politik memegang peran penting sebagai wahana partisipasi politik masyarakat sekaligus sebagai institusi yang menjalankan fungsi representasi. Partai politik bertugas menyampaikan aspirasi rakyat melalui kader-kader yang didorong untuk menduduki jabatan politik, baik di tingkat

eksekutif maupun legislatif. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai partai berbasis Islam tradisional memiliki peran penting dalam dinamika politik nasional, khususnya sejak era reformasi 1999. Perkembangan elektoral PKB secara nasional dari Pemilu 1999 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang fluktuatif namun konsisten mengalami penguatan dalam satu dekade terakhir. Dari sempat meraih 12,62% suara pada 1999 dan turun drastis pada 2009, PKB kembali bangkit dengan raihan 10,62% suara dan 68 kursi DPR RI pada Pemilu 2024. Data ini menunjukkan kemampuan PKB dalam melakukan konsolidasi dan menyesuaikan strategi politiknya terhadap perubahan zaman dan ekspektasi pemilih.

Strategi komunikasi menjadi kunci dalam mengarahkan opini publik dan mengikat loyalitas pemilih. PKB menerapkan pendekatan kultural-keagamaan, dengan basis pesantren, tokoh agama, dan struktur Nahdlatul Ulama sebagai instrumen komunikasi politiknya (Mietzner, 2013). Di sisi lain, media sosial juga mulai dimanfaatkan secara aktif untuk menjangkau pemilih muda dan membangun citra partai yang adaptif terhadap zaman. Komunikasi politik yang dilakukan tidak hanya bersifat verbal, tetapi juga simbolik dan visual—mulai dari penggunaan simbol keagamaan, warna khas partai, hingga narasi perjuangan rakyat yang mengakar. Strategi ini diperkuat melalui pendekatan personal, penguatan jaringan lokal, serta mobilisasi struktur kultural untuk membentuk komunikasi dua arah dengan masyarakat (Budiardjo, 2008).

Sebelum meraih tiga kursi di DPRD Kabupaten Batu Bara pada Pemilu 2024, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menghadapi berbagai tantangan elektoral yang signifikan. Pada periode 2014–2019, PKB gagal memperoleh kursi karena

beberapa faktor utama. Pertama, lemahnya kaderisasi di tubuh partai menyebabkan minimnya regenerasi dan ketidaksiapan caleg dalam menghadapi kontestasi politik lokal (Budiardjo, 2008). Kedua, figur calon legislatif (caleg) dari PKB kurang dikenal oleh masyarakat, yang memperlemah daya tarik elektoral partai di tingkat akar rumput. Ketiga, strategi komunikasi politik yang digunakan tidak tersusun secara sistematis—baik dari segi pesan, media, maupun kanal distribusinya—sehingga tidak mampu menjangkau konstituen secara efektif (Mietzner, 2013).

Situasi ini tidak banyak berubah pada awal periode 2019–2024. PKB hanya mampu meraih satu kursi, yang menjadi indikasi adanya perbaikan, namun belum signifikan. Hambatan yang masih tersisa mencakup keterbatasan sumber daya partai di tingkat lokal, kurangnya pelatihan politik bagi kader, serta belum optimalnya pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi dalam komunikasi politik (KPU, 2024). Keterlambatan PKB dalam membaca peta perubahan perilaku pemilih, terutama generasi muda dan pemilih pemula, juga menjadi faktor penghambat dalam memperluas basis dukungan.

Namun, keberhasilan PKB di Pemilu 2024 tidak lepas dari dinamika historis sebelumnya. Pada 2014–2019, PKB tidak mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Batu Bara. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kaderisasi, kurang dikenalnya figur caleg, dan tidak terstrukturnya strategi komunikasi politik (KPU, 2024). Pada 2019–2024, partai ini mulai bangkit dengan meraih satu kursi, dan akhirnya mencapai tiga kursi pada 2024 (Detik, 2024). Meski demikian, PKB dihadapkan pada dilema strategi: apakah tetap bertahan dengan pendekatan ideologis atau mulai lebih pragmatis dalam menjangkau pemilih baru.

Berdasarkan paparan tersebut, penting untuk meneliti strategi komunikasi politik PKB dalam memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Batu Bara pada Pemilu 2024. Fokus penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana pola komunikasi politik yang dilakukan PKB dapat memengaruhi persepsi dan pilihan politik masyarakat.

PKB terus mengembangkan sayapnya hingga ke tingkat daerah, termasuk di Provinsi Sumatera Utara. Belum lama ini, sejumlah kaum muda berkumpul di Kabupaten Batu Bara, menunjukkan semangat perubahan dan pencerahan yang menjadi ruh perjuangan partai ini. Kendati demikian, PKB tetap berupaya tampil sebagai partai yang berjiwa nasionalis, dengan tujuan besar mewujudkan Indonesia sebagai kekuatan kelima di dunia. Sebagai partai yang kini mulai menancapkan pengaruhnya di DPRD Kabupaten Batu Bara, PKB berupaya memperoleh kepercayaan publik dan legitimasi politik di tengah ketatnya persaingan politik. Dalam konteks tersebut, penciptaan identitas partai menjadi penting agar PKB dapat dikenal luas dan tampil berbeda dari partai-partai politik lainnya. Oleh karena itu, strategi yang tepat menjadi kunci untuk memperkuat eksistensi dan pengaruh PKB, baik di tingkat nasional maupun daerah. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk memilih judul **“Strategi Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dalam Mempengaruhi Perolehan Kursi DPRD Pada Pemilu Legislatif 2024 Di Kabupaten Batubara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka masalah yang dapat ditarik untuk diteliti yaitu :

1. Bagaimana strategi partai kebangkitan bangsa dalam memperoleh kursi pada pemilu legislatif 2024 di kabupaten batubara?
2. Apa faktor yang menghambat partai kebangkitan bangsa dalam memperoleh kursi pada pemilu legislatif 2024 di kabupaten batubara?

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini mengkaji strategi yang digunakan oleh partai kebangkitan bangsa Batubara sebagai salah satu kontestan yang akan mengikuti pemilu legislatif di Kabupaten Batubara, sehingga PKB dapat meraih kursi dan menjadi partai pemenang di Kabupaten Batubara.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang di tetapkan dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin di capai adalah :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Politik Partai Kebangkitan Bangsa dalam memperoleh kursi dalam kontestasi pemilu legislatif 2024 di kabupaten batubara.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menghambat partai kebangkitan bangsa dalam memperoleh kursi sebagai partai peserta pemilu legislatif 2024 di kabupaten batubara.

1.5 Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat teoritis

1. Menjadi bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya untuk lebih menyempurnakan penelitian yang sama dan memperkaya kajian studi ilmu politik khususnya.
2. Memberi kontribusi positif dan menjadi pembelajaran terkait marketing politik untuk memenangkan sebuah pemilihan legislatif khususnya di Kabupaten Batubara.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Menjadi masukan terutama bagi penulis sendiri dan segenap mahasiswa ilmu politik terkait strategi kemenangan pada saat pemilihan.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat khususnya tentang bagaimana partai politik bisa memberikan kiprah yang nyata bagi masyarakat dalam perjuangan politik di parlemen.